BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 dan UU no. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 32 tahun 2004). Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih, 2003).

Kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan pada saat kurang tepat mengingat hampir seluruh daerah sedang berupaya untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang dimulai pertengahan 1997 (Saragih, 2003). Akibatnya kebijakan ini memunculkan kesiapan (fiskal) daerah yang berbeda satu dengan yang lain. Kebijakan ini justru dilakukan pada saat terjadi disparitas pertumbuhan (ekonomi) yang tinggi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola

sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Terjadinya pembangunan disuatu negara atau daerah ditandai dengan beberapa aktivitas perekonomian seperti meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan. Menurut (Kuncoro, 2004) ada tiga masalah pokok yang harus diperhatikan dalam mengukur pembangunan suatu negara atau daerah, yaitu 1) Apa yang terjadi pada tingkat kemiskinan, 2). Apa yang etrjadi terhadap pengangguran, 3). Apa yang terjadi terhadap ketimpangan dalam bernagai bidang. Hal ini dapat dilihat bahwa hakekatnya di negara-negara berkembang terdapat kemiskinan yang sangat serius lagi sebagai akibat ketidak pastian perekonomian.

Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB, karena berdasarkan analisis elastisitas PAD terhadap PDRB yang dilakukan oleh Bappenas (2003), diketahui bahwa ada I2 provinsi (4l,37%) Yang mempunyai nilai elastisitas $\geq$ 1 (lebih dari satu). Setiap perubahan PDRB di 12 provinsi tersebut sensitif terhadap perubahan atau peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pembahan PAD. Sedangkan provinsi yang lain perubahan PDRB-nya tidak cukup mempengaruhi peningkatan PAD. Hal ini diduga terjadi karena nilai tambah PDRB lebih banyak keluar dari daerah tempat kegiatan perekonomian tersebut diselenggarakkan.

Berdasarkan laporan BPS Provinsi Jawa Barat. PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2007 – 2011 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahunnya. Untuk mengetahui berapa pertumbuhan ekonominya berikut penelitian sajikan data tabel PDRB dan hasil perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2007 – 2011:

Tabel 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Atas Dasar Harga Konstan 2000

(Berdasarkan Rasio)

No	Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kab. Bandung	5,91695%	5,30170%	4,33579%	1,00899%	11,05077%
2	Kab. Bekasi	6,13773%	6,07042%	5,04365%	6,17854%	6,26228%
3	Kab. Bogor	6,04657%	5,57552%	4,14266%	5,08628%	5,95992%
4	Kab. Ciamis	5,00856%	4,93870%	4,92441%	5,07219%	5,10296%
5	Kab. Cianjur	4,18170%	4,04051%	3,93396%	4,52992%	4,74845%
6	Kab. Cirebon	8,04445%	2,29038%	5,08386%	4,95638%	5,02655%
7	Kab. Garut	4,75769%	4,68642%	5,56820%	5,34484%	5,48225%
8	Kab. Indramayu	2,65373%	2,14200%	3,83859%	10,58627%	-0,90296%
9	Kab. Karawang	5,44281%	6,92825%	12,30285%	10,42725%	6,63460%
10	Kab. Kuningan	4,22324%	4,28414%	4,38516%	4,99419%	5,41729%
11	Kab. Majalengka	4,86825%	4,56707%	4,73012%	4,59300%	4,67752%
12	Kab. Purwakarta	3,90263%	9,40903%	1,02892%	5,97732%	6,18570%
13	Kab. Subang	4,84999%	4,73511%	4,21838%	5,00985%	3,79006%
14	Kab. Sukabumi	4,18575%	3,89356%	3,65378%	4,01628%	4,06476%
15	Kab. Sumedang	4,63558%	4,56682%	4,77750%	4,22091%	4,81866%
16	Kab. Tasikmalaya	4,32604%	4,02139%	8,07449%	4,26969%	4,31339%
17	Kota Bandung	8,23853%	8,16868%	8,33749%	8,44733%	8,72857%
18	Kota Bekasi	6,44134%	5,93920%	4,13170%	5,83691%	7,08123%
19	Kota Bogor	6,09341%	5,98291%	6,01434%	6,07075%	6,24579%
20	Kota Cirebon	6,17285%	5,63516%	-13,21761%	3,82022%	5,92996%
21	Kota Depok	7,03952%	6,41865%	6,21647%	6,35862%	6,59077%
22	Kota Sukabumi	6,50782%	6,11234%	6,13845%	6,10866%	6,31391%
23	Kota Tasikmalaya	5,98094%	5,69514%	5,71678%	5,72680%	5,80802%
24	Kota Cimahi	5,03392%	4,77323%	4,62650%	5,30475%	5,55645%
25	Kota Banjar	4,93363%	4,81678%	5,13067%	5,28409%	5,35469%
26	Kab. Bandung Barat	5,34601%	5,08496%	7,73714%	5,46596%	4,55023%

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (diolah)

Gambar 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Periode 2007 – 2011

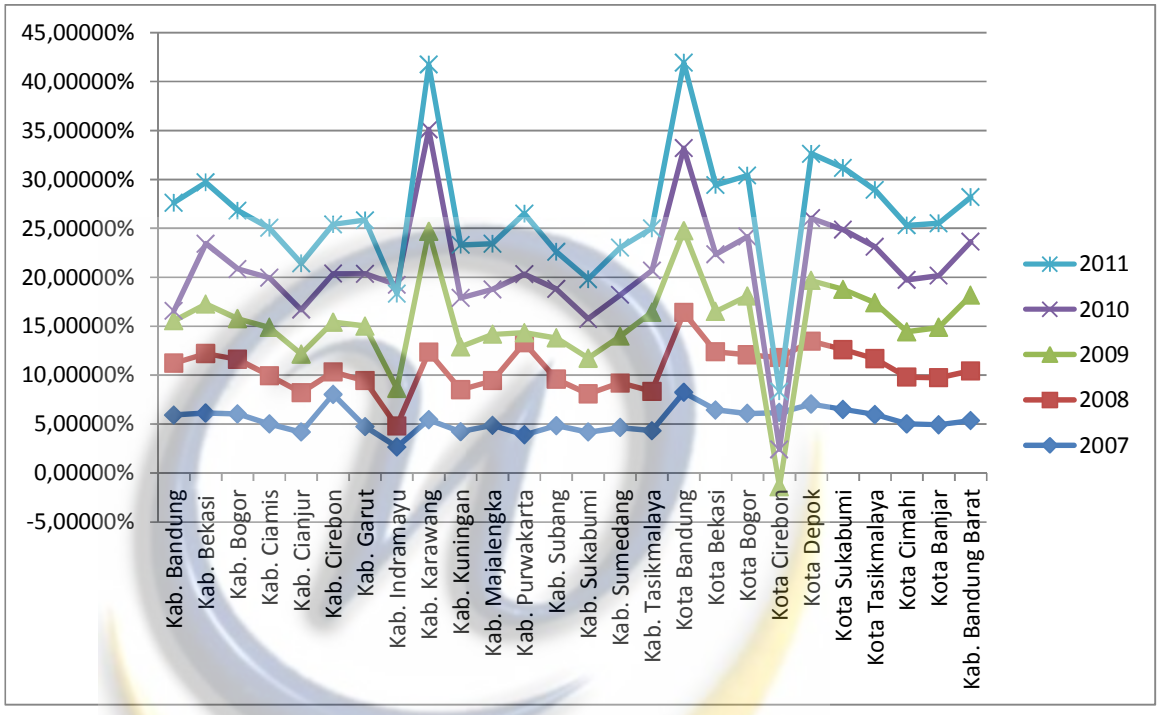

Berdasarkan tabel dan gambar diatas menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan 2000 ada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang mengalami peningkatan dan ada pula yang mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya.

Tabel 1.2

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional

(2007 – 2011)

No	Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011
1	Nanggroe Aceh Darussalam	70.53	70.67	71.31	71.70	72.16
2	Sumatera Utara	72.78	73.29	73.80	74.19	74.65
3	Sumatera Barat	72.23	72.96	73.44	73.78	74.28
4	Riau	74.63	75.09	75.60	76.07	76.53
5	Jambi	71.63	71.99	72.45	72.74	73.30

6	Sumatera Selatan	71.40	72.05	72.61	72.95	73.42
7	Bengkulu	71.57	72.14	72.55	72.92	73.40
8	Lampung	69.78	70.30	70.93	71.42	71.94
9	Bangka Belitung	71.62	72.19	72.55	72.86	73.37
10	Kepulauan Riau	73.68	74.18	74.54	75.07	75.78
11	DKI Jakarta	76.59	77.03	77.36	77.60	77.97
12	**Jawa Barat**	**70.71**	**71.12**	**71.64**	**72.29**	**72.73**
13	Jawa Tengah	70.92	71.60	72.10	72.49	72.94
14	Yogyakarta	74.15	74.88	75.23	75.77	76.32
15	Jawa Timur	69.78	70.38	71.06	71.62	72.18
16	Banten	69.29	69.70	70.06	70.48	70.95
17	Bali	70.53	70.98	71.52	70.28	73.84
18	Nusa Tenggara Barat	63.71	64.12	64.66	65.20	66.23
19	Nusa Tenggara Timur	65.36	66.15	66.60	67.26	67.75
20	Kalimantan Barat	67.53	68.17	68.79	69.15	69.66
21	Kalimantan Tengah	73.49	73.88	74.36	74.64	75.06
22	Kalimantan Selatan	68.01	68.72	69.30	69.92	70.44
23	Kalimantan Timur	73.77	74.52	75.11	75.56	76.22
24	Sulawesi Utara	74.68	75.16	75.68	76.09	76.54
25	Sulawesi Tengah	69.34	70.09	70.70	71.14	71.62
26	Sulawesi Selatan	69.62	70.22	70.94	71.62	72.14
27	Sulawesi Tenggara	68.32	69.00	69.52	70.00	70.55
28	Gorontalo	68.83	69.29	69.79	70.28	70.82
29	Sulawesi Barat	67.72	68.55	69.18	69.64	70.11
30	Maluku	69.96	70.38	70.96	70.42	71.87
31	Maluku Utara	67.82	68.18	68.63	69.03	69.47
32	Irian Jaya Barat	67.28	67.95	68.58	69.15	69.65
34	Papua	63.41	64.00	64.53	64.94	65.36

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat juga mengalami peningkatan tetapi peningkatannya relatif masih kecil dari tahun 2007 hingga 2011. Tahun 2008 IPM sebesar 71,12 meningkat 0,41 dari tahun 2007 sebesar 70,71. Tahun 2009 IPM sebesar 71,64 meningkat 0,52 dari tahun 2008 sebesar 71,12. Tahun 2010 IPM juga mengalamim Peningkatan IPM sebesar 72,29 meningkat 0,65 dari tahun 2009 sebesar 71 ,64. Tahun 2011 IPM juga mengalami peningkatan IPM sebesar 72.73 meningkat 0,44 dari tahun 2010 sebesar 72.29.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut (Halim, 2004) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Bratakusumah & Solihin, 2002) pengertian PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan - kegiatan daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah erat kaitannya dengan bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya. Setelah terjadianya reformasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, daerah dituntut untuk mampu mengoptimalisasikan potensi PAD untuk berlangsungnya rumah tangga daerahnya sendiri sehingga dalam membiayai pembangunan daerah tidak telalu bergantung pada pemerrintah pusat (Sarangih, 2003). Berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2011 bahwa Realisai Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dan penurunan. Untuk lebih jelasnya berikut Tabel Realisai Anggran PAD :

Tabel 1.3

Tabel Realisasi PAD

Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2007 – 2011

(Berdasarkan Rasio)

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kab. Bandung	11,16969%	-13,46305%	15,29715%	8,34973%	11,29017%
2	Kab. Bekasi	13,70350%	-5,16398%	54,31097%	-17,22030%	9,64411%
3	Kab. Bogor	16,99110%	6,47496%	19,58913%	18,15903%	8,84165%
4	Kab. Ciamis	76,58098%	-15,16116%	10,46943%	1,99593%	5,31549%
5	Kab. Cianjur	5,48591%	-3,91069%	40,42532%	11,37771%	14,71517%
6	Kab. Cirebon	9,03509%	20,92001%	-4,65043%	13,35533%	29,05805%
7	Kab. Garut	22,12362%	9,35052%	22,16518%	6,04862%	8,31083%
8	Kab. Indramayu	-6,73144%	28,57470%	40,87744%	13,46292%	5,05504%
9	Kab. Karawang	7,78665%	-18,88273%	32,01615%	8,67446%	25,57205%
10	Kab. Kuningan	21,76366%	4,99124%	39,17312%	11,56713%	11,67831%
11	Kab. Majalengka	-8,03781%	-3,05776%	52,69297%	13,85611%	4,62568%
12	Kab. Purwakarta	-2,81307%	18,00740%	7,84375%	5,59444%	29,67753%
13	Kab. Subang	14,54578%	-5,27201%	20,49524%	7,84079%	14,10705%
14	Kab. Sukabumi	26,00267%	9,41830%	8,99868%	6,79047%	34,60284%
15	Kab. Sumedang	17,12979%	16,63767%	13,25036%	25,59373%	21,11762%
16	Kab. Tasikmalaya	-2,01759%	-7,74799%	55,01129%	-2,69063%	-5,74115%
17	Kota Bandung	27,32893%	14,01535%	9,96740%	14,44690%	5,10597%
18	Kota Bekasi	34,56270%	9,05429%	25,24050%	34,16762%	8,28041%
19	Kota Bogor	8,54758%	-4,83477%	65,33845%	-10,46129%	11,80806%
20	Kota Cirebon	1,05807%	16,17411%	16,75644%	17,43089%	11,45320%
21	Kota Depok	25,61750%	-4,75213%	43,88536%	-10,66468%	47,12460%
22	Kota Sukabumi	38,24621%	-6,31670%	39,72238%	0,55520%	28,39194%
23	Kota Tasikmalaya	15,29630%	0,67442%	29,66661%	24,71670%	9,94111%
24	Kota Cimahi	10,98008%	7,78301%	24,65012%	4,90695%	13,66335%
25	Kota Banjar	25,68259%	0,70466%	17,78451%	33,38533%	9,39573%
26	Kab. Bandung Barat	-	-	-	25,78311%	48,01100%

Sumber : Badan Pusat Statistika (diolah)

Gambar 1.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
Periode Tahun 2007-2011

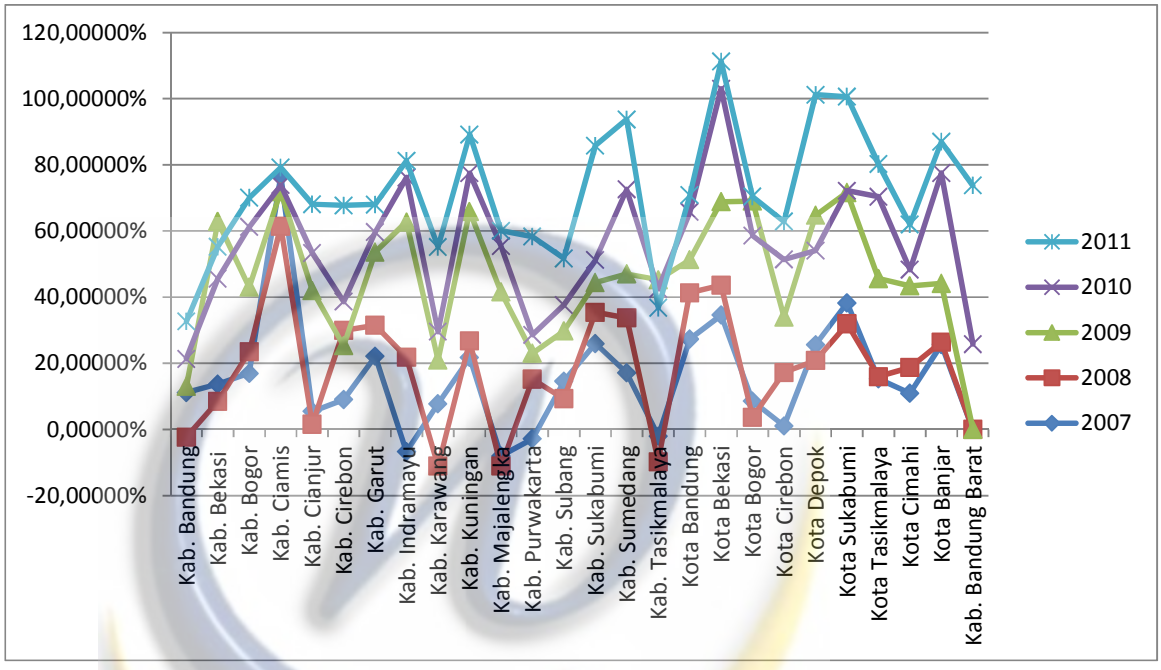

Dari tabel dan grafik di atas, terlihat peningkatan dan penurunan PAD yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2007- 2011. Pada data tersebut hanya Kabupaten Bandung Barat yang mengalami peningtakan dari tahun ke tahunnya. Sedangakn Kab/Kota lain di Provinsi Jawa Barat masih banyak yang mengalami penurunan di setiap tahunnya.

Jadi dapat disimpulkan dari uraian diatas terlihat bahwa angka Laju Pertumbuhan Ekonomi berbanding terbalik dengan angka Pendapatan Asli Daerah. Untuk itulah maka pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu wujud nyata otonomi. Pengembangan dan penggalian potensi PAD sebenarnya sudah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, mengingat PAD sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi yang utuh, nyata dan bertanggungjawab di daerah kabupaten atau kota. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan PAD akan

membawa kearah kemandirian perekonomian daerah yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi didaerah (Abdul Halim, 2007).

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi maka bermaksud menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul: "**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalh sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
2. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi beberapa pihak, antara lain :

1. Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

2. Bagi penulis, memberikan pengetahuan dan perluasan wawasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat.
3. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan dan masukan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan tentang pertumbuhan ekonomi.
4. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data laporan realisasi Anggran Pendapatan dan Belanja Daearh (APBD) Pemda Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat melalui situs dan data Induk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Penguhulu Hasan Mustafa No. 43, Bandung 40124. Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2013 sampai dengan penelitian selesai.